



PERBANDINGAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, KOSTA RIKA, REPUBLIK IRLANDIA, AUSTRALIA, DAN MALAWI

Ade Sopyan Hadi¹, Zulkifli Alamsah Sutanto², Anisia Nur Mitha Sari³

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cenderawasih

²Fakultas Keguruan dan Ilmu, Pendidikan, Universitas Tadulako

³Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Kampus Abepura Jl. Raya Sentani-Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua 99358

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Alamat: Jl Bali, Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, 38119

Email: adesopyanhadi@fkip.uncen.ac.id, zulkifli.alamsah15@gmail.com, anisianurmithasari@gmail.com

Abstrak

Berbagai problematika yang ada pada berbagai negara seperti di Indonesia terjadi konflik Sampit. Kasus rasisme di Amerika Serikat. Adanya angka pembunuhan tertinggi tahun 2023 di Kosta Rika, Adanya warga Finlandia bergabung dengan ISIS. Masalah imigrasi di Australia. Selain itu terdapat masalah perbedaan sudut pandang warga negara di Malawi terkait pengiriman tenaga kerja ke Israel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan data bahwa pada bangsa Indonesia dan negara Inggris tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk menjadikan warga negara yang baik, pada negara Kosta Rika pendidikan kewarganegaraannya mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pada negara Republik Irlandia pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan menyatu meresapi setiap pengajaran, pada negara Australia pendidikan kewarganegaraan sebagai alat mengembangkan pengetahuan siswa, pada negara Malawi pendidikan kewarganegaraan memegang peran dalam mempersatukan bangsa.

Kata Kunci: Perbandingan, Pendidikan Kewarganegaraan, Indonesia

Abstrak

Various problems exist in various countries such as in Indonesia, the Sampit conflict. Cases of racism in the United States. The highest murder rate in 2023 in Costa Rica, the presence of Finnish citizens joining ISIS. Immigration problems in Australia. In addition, there is a problem of different perspectives of citizens in Malawi regarding sending workers to Israel. The research method used in this study is a qualitative approach, while the type of research used is a literature study. The results of this study show data that in Indonesia and the United Kingdom the main goal of civics education is to create good citizens, in Costa Rica, civics education teaches respect for human rights, in the Republic of Ireland, religious education and civics education are integrated into every lesson, in Australia, civics education is a tool to develop students' knowledge, in Malawi, civics education plays a role in uniting the nation.

Kata Kunci: Comparison, Civic Education, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pada negara Indonesia terdapat berbagai masalah seperti pada tahun 2001 akan selalu diingat sebagai masa kelam dalam sejarah Indonesia, khususnya untuk Kota Sampit di Pulau Kalimantan. Pada tahun itu, terjadi konflik berdarah antara masyarakat Suku Dayak dan Madura. Tragedi ini kemudian juga dikenal sebagai Konflik Sampit. Sebelum tragedi berdarah itu pecah, konflik antara kedua suku sebenarnya telah terjadi sejak lama. Perpecahan antara Suku Dayak dan Madura kemudian memunculkan gelombang kekerasan yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Kota Sampit (Etania &



Indriawati, 2023). Selain itu pada bangsa Indonesia juga terdapat karakter warga negara yang tidak sesuai dengan dasar negara. Hal tersebut seperti dengan adanya kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010-2021. Ada enam orang mantan pejabat PT Antam yang telah ditetapkan sebagai tersangka (Fadhil, 2024). Kedua peristiwa tersebut tentu mengganggu ketenteraman dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia baik yang masih bersifat regional maupun yang bersifat nasional.

Negara Amerika Serikat terdapat masalah warga negara seperti pada tahun 2020 yang dapat dilihat dengan adanya kematian seorang pria berkulit hitam yaitu George Floyd, setelah lehernya ditindih lutut polisi berkulit putih di Minneapolis menimbulkan protes keras dari banyak orang di Amerika Serikat. Ribuan orang turun ke jalan di Minneapolis dan Minnesota mengutuk kematian Floyd dan menentang segala bentuk diskriminasi dan rasisme. Aksi unjuk rasa anti-rasisme juga meletus di kota-kota besar lainnya di Amerika Serikat. Bahkan, aksi protes tersebut berakhir ricuh diwarnai bentrokan antara polisi dan demonstran (Kurmala, 2020). Hal tersebut tentu telah mencederai demokrasi yang ada di Amerika Serikat yang telah lama menjadi rujukan sistem demokrasi dari berbagai dunia.

Julukan negara Kosta Rika yang dikenal dengan dengan negara aman dan damai tercoreng dengan adanya rekor tertinggi pembunuhan sepanjang tahun 2023 dengan jumlah 656 kasus. Pemerintah bahkan memperkirakan jumlah tersebut bisa meningkat mencapai 900 lebih kasus sampai akhir tahun 2023. Pada tahun 2023, kasus pembunuhan di Kosta Rika mencatat rekor 654 kasus dan memecahkan rekor tertinggi, kata Badan Investigasi Judisial (OIJ) negara di Amerika Tengah itu. Menurut para pejabat setempat, kasus kejahatan tersebut di antaranya berupa penyiksaan, pembunuhan terkait geng, serta pembunuhan yang dilakuk

an oleh pembunuh bayaran yang sangat terlatih mirip kejahatan kartel Meksiko (Joshua, 2023). Peristiwa tersebut tentu meresahkan dan mengganggu ketenteraman warga negara yang ada di Kosta Rika.

Pada negara Republik Finlandia Pandangan negatif masyarakat Finlandia terhadap Islam semakin menguat. Kondisi itu terkuak dalam sebuah studi tentang sikap masyarakat negeri itu terhadap berbagai agama. Menurut hasil survei, agama Kristen mendapatkan apresiasi positif di kalangan masyarakat Finlandia. Sementara Islam merupakan agama yang paling dikritisi masyarakat Finlandia. Finlandia cukup antipati terhadap agama. Disebutkan dalam survei, empat dari lima warga Finlandia menganggap orang-orang dengan keyakinan agama yang kuat cenderung tidak toleran. Sementara tiga dari lima warga Finlandia berpikir agama condong membawa konflik ketimbang perdamaian (Sasongko, 2011) Selain itu, pada tahun 2015 Presiden Finlandia Sauli Niinistö mengatakan sebanyak 60 hingga 80 warganya telah berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Menurutnya, angka tersebut memang tidak banyak, tetapi jika dibandingkan dengan populasi Muslim Finlandia yang hanya berkisar 50 ribu hingga 60 ribu, jumlah tersebut sangatlah banyak (Linggasari, 2015).



Terdapat masalah internasional yang melanda Australia yaitu seperti masalah imigrasi. Pemerintah federal Australia akan mengubah sistem imigrasi Australia di hampir setiap kategori visa. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Australia dalam acara National Press Club 2023. Salah satu perubahan tersebut termasuk meningkatkan upah minimum yang harus dibayar perusahaan bagi pekerja, serta membuka jalur bagi 17.000 pekerja sementara untuk mendapatkan status penduduk tetap. Sistem migrasi di Australia dinilai "kompleks, tidak efisien, dan tidak fleksibel", menurut sebuah tinjauan yang dilakukan, dengan rekomendasi agar mengubah jenis visa, sejumlah tes, serta masalah terkaitnya yang sudah bertahun-tahun diterapkan (ABC, 2023). Masalah imigrasi yang ada pada negara Australia harus dapat diselesaikan secara demokratis sebagai bagian dari demokrasi internasional.

Pada negara Malawi stabilitas regional terganggu setelah adanya kepergian ratusan warga Malawi ke Israel untuk bekerja sebagai buruh tani telah memicu perdebatan di negara Afrika Selatan tersebut, yang berupaya mendapatkan mata uang asing yang sangat dibutuhkan di tengah krisis uang tunai. Pada tanggal 25 November, tahap pertama dari 221 pekerja berangkat ke Israel. Penerbangan selanjutnya diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang, menurut pernyataan Kementerian Tenaga Kerja, yang tidak menyebutkan angkanya (Pensulo, 2023). Perdebatan pada negara Malawi hendaknya diselesaikan secara demokratis dan mengedepankan persatuan bangsa dan negara.

Berdasarkan berbagai problematika yang ada pada berbagai negara tersebut seperti di Indonesia terjadi konflik berdarah yang dikenal sebagai konflik Sampit. Kasus rasisme di Amerika Serikat pada tahun 2020 yaitu George Floyd. Adanya rekor tertinggi pembunuhan sepanjang tahun 2023 dengan jumlah 656 kasus pada negara Kosta Rika. Sebanyak 60 hingga 80 warga Finlandia telah berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Masalah internasional yang melanda Australia yaitu seperti masalah imigrasi. Selain itu terdapat perbedaan sudut pandang warga negara di Malawi terkait pengiriman tenaga kerja ke Israel. Hal-hal tersebut tentu dapat memunculkan perpecahan pada warga negara tingkat nasional maupun internasional, oleh karena itu hal tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan dasar maupun tujuan berbangsa dan bernegara negara yang bersangkutan yang salah satunya terdapat pada tujuan pendidikan kewarganegaraan yang bersangkutan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian Perbandingan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia, Amerika Serikat, Kosta Rika, Republik Irlandia, Australia, dan Malawi tersebut yaitu pendekatan kualitatif. Creswell (2009) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami isu-isu sosial atau perilaku-perilaku yang terdapat pada individu maupun kelompok. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif ini yaitu agar didapatkan data yang konkret mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan sehingga tujuan pada penelitian ini dapat terwujud.



Pada penelitian Perbandingan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia, Amerika Serikat, Kosta Rika, Republik Irlandia, Australia, dan Malawi, jenis penelitian yang diterapkan yaitu jenis studi kepustakaan. Studi kepustakaan berarti jenis penelitian melalui pengumpulan berbagai data seperti buku, majalah, maupun yang lain (Saputri & Nuryono, 2018). Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang secara langsung dapat digunakan untuk pengumpulan data. Sedangkan, sumber data sekunder seperti buku, surat kabar serta informasi-informasi lain yang merupakan data tambahan (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Sebagaimana telah diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan wajib diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara (Adha & Perdana, 2020). Upaya mewargakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang baik tentunya amat bergantung dari pandangan hidup sistem politik negara yang bersangkutan.

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri adalah agar warganya menjadi warga negara yang baik, karena warga yang baik secara tidak langsung mendukung keberlangsungan negara yang bersangkutan (Zulfikar & Dewi, 2021). Simorangkir dalam Suharyanto (2013) mengatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang sah dan benar, meletakkan dan menanamkan pola berpikir (*fattern of thought*) sesuai dengan Pancasila dan watak (*character*) Indonesia; menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik, menggugah kesadaran anak warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila; memberikan motivasi agar dalam setiap sikap dan tingkah lakunya bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila.

B. Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat

Pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat berasal langsung dari budaya politik yang berlaku, dan bahwa perannya dalam masyarakat adalah untuk menanamkan dalam populasi terutama yang muda. Pendidikan kewarganegaraan di Amerika berusaha untuk mempersiapkan anak-anak untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, untuk membangun kewarganegaraan, atau untuk mempromosikan kewarganegaraan demokratis (Foste, 1978). Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat juga yaitu pengetahuan tentang sistem politik dan cara kerjanya yang sebenarnya dan idealnya, pengembangan keterampilan partisipasi dalam kehidupan sipil, peningkatan kompetensi sipil, komitmen terhadap nilai-



nilai yang sesuai dengan prinsip yang mendasari lembaga-lembaga demokrasi dan kapasitas untuk menganalisis konsekuensi dari nilai-nilai ini serta pengembangan harga diri sehingga semua individu merasa bahwa partisipasi mereka dalam kehidupan sipil tidak ada perbedaan (Reische, 1987).

C. Pendidikan kewarganegaraan di Kosta Rika

Pendidikan kewarganegaraan di Kosta Rika pada awal 1990-an juga mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hubungan damai, dan penghargaan terhadap perdamaian sebagai hasil dari saling menghormati antar manusia dan antar bangsa (Suarez, 2008). Dalam pedoman kurikuler baru untuk kelas delapan, misalnya, siswa mempelajari hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, orang cacat, minoritas dan imigran. Selain itu, di kelas sebelas, siswa diharapkan untuk mengidentifikasi 'situasi yang melanggar hak asasi manusia dan hak anak di tingkat nasional dan internasional. Seperti yang diharapkan dari kursus kewarganegaraan, siswa belajar tentang konstruksi konstitusi dan cara kerja sistem politik di Kosta Rika.

D. Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Irlandia

Di Republik Irlandia pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan, dan memang pendidikan agama harus meresapi setiap jenis pengajaran. Perpaduan pendidikan agama dan kewarganegaraan misalnya silabus sertifikat kelulusan pendidikan agama menekankan bahwa: 'Penekanan dalam silabus pada nilai keyakinan agama dan keragaman dan saling menghormati memiliki relevansi khusus untuk kewarganegaraan nasional (Finlay, 2013).

E. Pendidikan Kewarganegaraan di Australia

Pendidikan Kewarganegaraan di Australia didefinisikan sebagai pengembangan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang akan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang aktif dan terinformasi dalam masyarakat demokratis kita dalam konteks internasional (McAllister, 1998). Ketertarikan pada pendidikan kewarganegaraan di Australia berawal dari federasi pada tahun 1901. Silabus sekolah dasar New South Wales yang pertama, diterbitkan pada tahun 1904, mencakup kewarganegaraan dan moral yang mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, kewajiban, dan patriotisme.

F. Pendidikan Kewarganegaraan di Malawi

Banyak negara Afrika telah memiliki visi dan harapan mereka itu membawa mereka melalui perjuangan yang menyakitkan untuk kemerdekaan yang dihancurkan oleh konflik dan ketegangan agama dan/atau etnis. Tingkat pendidikan kewarganegaraan tertentu sangat penting untuk persatuan dan kesatuan kelangsungan hidup setiap masyarakat demokratis, tetapi terutama masyarakat yang diciptakan secara artifisial oleh kolonialisme (Mtumbuka, 1998). Dalam masyarakat seperti itu warga negara sering dipanggil oleh keadaan untuk mencapai pemahaman bersama masalah ras, suku, tanah, politik dan perbedaan agama dan hidup bersama sebagai bangsa. Pendidikan dapat memainkan peran kunci dalam



membantu warga negara untuk mencapai pemahaman secara damai tentang hal-hal tersebut.

Salah satu sumber yang sah dari nilai-nilai yang seharusnya dipromosikan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah Konstitusi Malawi. Di antara lainnya, Konstitusi Malawi didasarkan pada prinsip-prinsip, kesucian hidup manusia, persatuan, kebebasan pribadi, akuntabilitas, gender kesetaraan, perawatan untuk orang tua dan anak-anak, keadilan, dan kebebasan pidato.

4. PENUTUP

Pada bangsa Indonesia, negara Inggris tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk menjadikan warga negara yang baik yang dapat mendukung keberlangsungan bangsa dan negara, pada negara Kosta Rika pendidikan kewarganegaraannya mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hubungan damai, pada negara Republik Irlandia bahwa pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan, dan memang pendidikan agama harus meresapi setiap jenis pengajaran, pada negara Australia pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai alat mengembangkan pengetahuan yang akan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang aktif dan demokratis dalam konteks internasional, negara Malawi pendidikan kewarganegaraan memegang peran dalam mempersatukan bangsa. Oleh karena itu berbagai tujuan pendidikan di berbagai negara di dunia tujuannya merupakan untuk membentuk warga negara yang baik dan sesuai dengan konsep hak asasi manusia dan perdamaian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ABC, A. (2023, April 27). Australia Akan Reformasi Kebijakan Imigrasi, Termasuk Perketat Aturan Pelajar Internasional. *DetikNews*. <https://news.detik.com/abc-australia/d-6693041/australia-akan-reformasi-kebijakan-imigrasi-termasuk-perketat-aturan-pelajar-internasional>
- Adha, M. M., & Perdana, D. R. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. Graha Ilmu.
- Creswell, J. W. (2009). Qualitative, quantitative, and mixed-methods research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485. <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Etania, R. B., & Indriawati, T. (2023, August 29). Tragedi Sampit: Konflik Berdarah antara Suku Dayak dan Madura. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/29/170000479/tragedi-sampit--konflik-berdarah-antara-suku-dayak-dan-madura?page=all>
- Fadhil, H. (2024, May 31). adi Tersangka, Begini Modus 6 Eks Pejabat Antam Korupsi 109 Ton Emas. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-7366789/jadi-tersangka-begini-modus-6-eks-pejabat-antam-korupsi-109-ton-emas>
- Finlay, G. (2013). Comprehensive liberalism and civic education in the Republic of Ireland. In *n Recognition, Equality and Democracy*. Routledge.
- Foste, C. (1978). Civic Education in the United States and the Federal Republic of Germany. *Western European Education*, 8(3), 5–29.
- Joshua. (2023, September 23). Kasus pembunuhan naik tajam di Kosta Rika. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/3740016/kasus-pembunuhan-naik-tajam-di-kosta-rika>
- Kurmala, A. (2020, June 9). Kasus George Floyd dan krisis demokrasi Amerika Serikat. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/1543512/kasus-george-floyd-dan-krisis-demokrasi-amerika-serikat>



- Lingasari, Y. (2015, September 7). Segelintir Orang Buat Finlandia Terlihat Seperti Ekstremis. *CNN Indonesia Baca Artikel CNN Indonesia "Segelintir Orang Buat Finlandia Terlihat Seperti Ekstremis"* Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150907113010-141-77067/Segelintir-Orang-Buat-Finlandia-Terlihat-Seperti-Ekstremis> Dow. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150907113010-141-77067/segelintir-orang-buat-finlandia-terlihat-seperti-ekstremis>
- McAllister, I. (1998). Civic education and political knowledge in Australia. *Australian Journal of Political Science*, 33(1), 7–23.
- Mtumbuka, M. (1998). Civic education in Malawi. *Rish Educational Studies*, 17(1), 306–311.
- Pensulo, C. (2023, December 1). Apprehension in Malawi as government sends workers to Israel amid Gaza war. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2023/12/1/apprehension-as-malawi-sends-workers-to-israel>
- Reische, Diana, L. (1987). *Citizenship Goal of Education*. AASA Publications.
- Saputri, M. O., & Nuryono, W. (2018). Studi kepustakaan konseling rational emotive behavior therapy untuk mengurangi kecanduan game online. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 801–817. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/45865/38718>
- Sasongko/, A. (2011, August 24). Pandangan Negatif Masyarakat Finlandia Terhadap Islam Menguat. *REPUBLIKA.CO.ID*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/lqfql/pandangan-negatif-masyarakat-finlandia-terhadap-islam-menguat>
- Suarez, D. (2008). Rewriting citizenship? civic education in Costa Rica and Argentina. *Comparative Education*, 44(4), 485–503.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Alfabeta.
- Suharyanto, A. (2013). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar siswa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1), 192–203.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>